

PROBLEMATIKA PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEWUJUDKAN NILAI-NILAI KEPRIBADIAN SISWA

(Drs. H. ABD JALIL,.MP.d)

ABSTRAK

Pendidikan merupakan proses pengembangan dan penanaman seperangkat nilai yang implisit dalam setiap pelajaran dan sekaligus gurunya, maka tugas mendidik akhlaq untuk mewujudkan kepribadian siswa bukan hanya menjadi tanggung jawab guru PAI Ansich, apalagi iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan persyaratan utama bagi setiap guru, yang secara praktis akan berimplikasi pada keharusan setiap guru untuk mengimplisitkan nilai-nilai akhlaq yang mulia dalam setiap mata pelajaran, sebagaimana yang dilontarkan oleh Ibnu Mashawaih (330 H/940 M) bahwa setiap ilmu atau mata pelajaran yang diajarkan oleh pendidik harus memperjuangkan terciptanya akhlaq yang mulia.

Diakui terdapat beberapa problema dalam pelaksanaan pendidikan agama islam baik bersifat internal maupun eksternal. Kesulitan internal berasal dari sifat bidang studi PAI itu sendiri yang banyak menyentuh aspek-aspek metafisika dan bersifat abstrak atau menyangkut hal-hal yang bersifat super rasional. Sedang kesulitan eksternal berasal dari luar bidang studi PAI itu sendiri, antara lain menyangkut dedikasi guru PAI mulai menurun , lebih bersifat transaksional dalam bekerja dan lain sebagainya.

Sedang disisi lain pengaruh globalisasi makin menjadikan orang lebih berorientasi pada tindakan yang serba materialis, orang semakin bersifat rasional, orang semakin bersifat individualis, control sosial semakin melemah. Kesulitan eksternal tersebut pada dasarnya bersumber pada watak budaya barat yang sudah betul-betul mengglobal.

Kata Kunci : Problematika, Pendidikan Islam, Kepribadian.

I. PENDAHULUAN.

.Pada dasarnya manusia adalah hamba Allah yang diberi kewenangan untuk mengelola dan melestarikan alam untuk kemaslahatan yang diridloiNya. Maka dalam rangka melaksanakan amanat mengelola pendidikan seharusnya mendasarkan pada 3 hal, yaitu :

a. Amanah insan ila Robbi.

Yaitu suatu kesadaran sebagai hamba Allah yang wajib memiliki landasan aqidah yang kokoh dan moral yang baik, serta menyadari bahwa semua gerak-geriknya diawasi oleh Allah.

b. Amanah insan alal insan.

Yaitu suatu kesadaran sebagai makhluk social yang harus mempunyai kepedulian terhadap lingkungannya, terutama dalam hal ini adalah kepedulian terhadap lingkungan pendidikan dari mulai kebersihannya, keindahannya, keasriannya, penataan ruang kerja dan ruang kuliah, dls.

c. Amanah insan ala nafsih.

Yaitu suatu kesadaran individu tentang kewajibannya untuk senantiasa meningkatkan dirinya agar mampu memenuhi sunnatullah dan mampu mengikuti perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Dari ketiga hal tersebut, pada dasarnya setiap orang yang berilmu akan sirna kecuali orang yang mengamalkannya, dan semua orang yang beramal akan sirna kecuali orang-orang yang ikhlas. Keikhlasan inilah yang seharusnya menjadi dasar perjuangan hidup manusia di dunia ini.

II. PEMBAHASAN.

A. HARAPAN MASYARAKAT TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM DI MASA MENDATANG.

Dinamika perkembangan masyarakat bergulir terus tanpa bisa dibendung, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan dahsyat bagi kehidupan manusia, baik cara pandang maupun gaya hidupnya. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang terkait erat dengan masyarakat, sebab input dari lembaga pendidikan adalah masyarakat dan output lembaga pendidikan diserap oleh masyarakat, karena itulah pendidikan mesti peka terhadap perkembangan masyarakat.

Karena itu harapan masyarakat terhadap pendidikan islam di masa mendatang adalah suatu output yang mampu menjawab tantangan zaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Artinya suatu lembaga pendidikan islam harus tidak terlepas dari jangkauan atau kebutuhan masyarakat disekelilingnya, dalam hal ini yang dimaksud kebutuhan masyarakat tidak hanya terfokus pada kebutuhan ekonomi ansich, tetapi yang terpenting sekali adalah kebutuhan nilai nilai moral yang tumbuh dalam masyarakat di mana masyarakat merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan aktifitasnya karna hidup dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati, dan asah asih dan asuh satu sama lain, keadaan demikian akan bisa terwujud ketika lembaga pendidikan berkometmen untuk berupaya agar outputnya memiliki karakter, berakhlak mulia dan berkepribadian utuh.

B. KRITIK MASYARAKAT TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM DALAM KEADAANNYA SEKARANG.

Hingga saat ini bangsa Indonesia masih mengalami suasana keprihatinan yang bertubi-tubi. Hasil survey menunjukkan bahwa Indonesia masih bertengger dalam jajaran Negara yang paling korup didunia menurut Muhaimin (2009). Korupsi di Indonesia baik dilingkungan pejabat tinggi hingga lingkungan paling rendah, disiplin

makin longgar, tingkat penindasan yang kuat terhadap yang lemah sebagaimana yang tampak dari tingkah laku semrawut dan saling menindas, semakin meningkatnya tindak criminal, tindak kekerasan, anarkisme, premanisme, tindakan brutal, perkelahian antar pelajar, minum-minuman keras dan narkoba yang semuanya melanda dikalangan pelajar. Wal hasil bahwa bangsa Indonesia menghadapi krisis multi dimensional. Dari hasil kajian berbagai disiplin dan pendekatan tampaknya ada kesamaan pendekatan bahwa semua itu berpangkal pada krisis moral atau akhlaq. Dan krisis ini oleh beberapa pihak dituduhkan karena sebab kegagalan pendidikan agama (Muhaimin,2009).

Disisi lain PAI itu sendiri hingga saat ini masih berhadapan dengan kritik-kritik internal yaitu antara lain :

- Pertama* : PAI kurang bisa mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi “makna” dan “nilai”. PAI selama ini lebih menekankan pada aspek knowing dan doing dan belum mengarah ke aspek being.
- Kedua* : PAI kurang dapat berjalan bersama dan bekerjasama dengan program-program pendidikan non agama.
- Ketiga* : PAI kurang mempunyai relevansi terhadap perubahan social yang terjadi di masyarakat sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai yang hidup dalam keseharian.

C. ALTERNATIF YANG SEYOGYANYA DITEMPUH UNTUK MEMPERBAIKI SITUASI YANG DIKRITIK.

Kegiatan pendidikan merupakan suatu proses pengembangan dan penanaman seperangkat nilai dan norma yang implisit dalam setiap pelajaran dan sekaligus gurunya, maka tugas mendidik akhlaq yang mulia sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab guru PAI *an sich*. Apalagi iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan persyaratan utama bagi setiap guru, yang secara praktis akan berimplikasi pada keharusan setiap guru untuk mengimplisitkan nilai-nilai akhlaq yang mulia dalam setiap mata pelajaran yang dipelajari oleh setiap peserta

didik. Pandangan semacam itu juga telah dilontarkan oleh Ibnu Miskawih (330 H/940 M-421 H/1030 M) (dalam Muhaimin, 2009), bahwa setiap ilmu atau mata pelajaran yang diajarkan oleh guru/pendidik harus memperjuangkan terciptanya akhlaq yang mulia.

Hal itu bukan berarti para guru PAI mengelak dari tanggung jawabnya sebagai pembimbing dan pengarah ajaran dan moral agama, tetapi lebih merupakan upaya membangun kekompakan dan harmonisasi dalam proses pendidikan. Keteladanan akhlaq bukan hanya ditunjukkan oleh guru PAI, tetapi juga oleh para guru dan tenaga kependidikan lainnya. Apalagi saat ini kita sudah memasuki era globalisasi sebagai akibat dari kemajuan teknologi di bidang komunikasi dan informasi. Didalam era tersebut pendidikan di sekolah akan menghadapi tantangan yang lebih besar, terutama datang dari pengaruh budaya-budaya negative yang sudah mengglobal baik melalui tayangan televisi dengan antena parabolanya, internet atau website dan lain-lain.

Diakui bahwa terdapat beberapa kesulitan dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kesulitan Internal, berasal dari sifat bidang studi PAI itu sendiri yang banyak menyentuh aspek-aspek metafisika dan bersifat abstrak, atau menyangkut hal-hal yang bersifat supra rasional. Sedangkan kesulitan eksternal berasal dari luar bidang studi PAI itu sendiri, antara lain menyangkut dedikasi guru PAI mulai menurun, lebih bersifat transaksional dalam bekerja, orang tua dirumah kurang memperhatikan pendidikan agama anaknya, orientasi tindakan semakin materialis, orang semakin bersifat rasional, orang semakin bersifat individualis, control social semakin melemah, dan lain-lain. Kesulitan eksternal tersebut pada dasarnya bersumber pada watak budaya barat yang sudah betul-betul mengglobal.

Sebagian isi kebudayaan adalah musuh yang akan menghancurkan keberagaman para peserta didik. Budaya barat sudah mengglobal, sehingga kita harus mampu menyaring nilai-nilai mana yang boleh diambil dan mana yang tidak boleh diambil. Pendidikan agama islam

bertugas untuk memberikan filter dalam menghadapi budaya tersebut. Untuk mewujudkan upaya ini diperlukan semangat kebersamaan, kekompakan dan kerjasama yang harmonis dalam kegiatan pendidikan di sekolah/perguruan tinggi.

Secara normatif-teologis, untuk menyiapkan generasi penerus yang Qurrota A'yun (menyenangkan hati) dan imam (pengayom) bagi orang-orang yang bertaqwa diperlukan *Azواج* (pasangan-pasangan atau komponen-komponen pendidikan) yang kompak dan harmonis pula. Agar kekompakan dan keharmonisan kerja dapat terwujud, maka ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih dan menyeleksi pasangan atau mitra kerja dalam rangka membangun generasi penerus yang Qurrota A'yun, yaitu :

- 1) Istitha', yakni siap dan mampu untuk berpasangan secara harmonis (H.R. Bukhori dan Muslim).
- 2) Limaliha, yakni wawasan keilmuan dan keahliannya, atau kematangan profesionalismenya.
- 3) Linasabiha, yakni asal usul atau latar belakangnya, termasuk latar belakang pendidikannya, siapa dia, dapat dipercaya atau tidak
- 4) Lijamaliha, yakni komitmennya terhadap ajaran dan nilai-nilai islam, atau kemantapan akidah dan kedalaman spiritualnya serta keunggulan moralnya (H.R. Bukhori dan Muslim,t.t.).

Kekompakan kerja dan keharmonisan hubungan diantara mitra kerja itu bukan berarti mengandung konotasi hubungan ketaatan dan kepatuhan pasif, tetapi justru didalamnya terdapat hubungan yang dialogis. Namun demikian, tetap dijaga dan dipelihara hubungan yang harmonis diantara mitra kerja tersebut, yang diwujudkan dalam bentuk ; *pertama*, adanya saling pengertian, untuk tidak saling mendominasi; *kedua*, adanya saling menerima, untuk tidak saling berjalan menurut kemauannya sendiri-sendiri; *ketiga*, adanya saling percaya untuk tidak saling curiga-mencurigai; *keempat*, saling menghargai, untuk tidak saling truth-claim (klaim kebenaran); dan *kelima*, saling kasih sayang untuk tidak saling membenci dan iri hati (Muhaimin,et.al.,2001).

Dari uraian diatas maka problematika yang harus diurai untuk memperbaiki situasi yang dikritik adalah:

1. Pendidikan agama islam harus menjadi tanggung jawab semua guru, tidak hanya guru PAI. Karena itu semua guru bidang studi harus mengimplementasikan nilai-nilai akhlaq yang mulia dalam semua mata pelajaran.
2. Orang tua dan pendidik harus bisa memfilter budaya negative dari Barat yang sudah mengglobal. Sehingga bisa menyaring nilai-nilai mana yang bisa diambil dan mana yang tidak boleh diambil dan untuk mewujudkannya dibutuhkan kerjasama yang harmonis dalam pendidikan di sekolah/Perguruan Tinggi.
3. Kekompakan dan keharmonisan diantara mitra kerja itu harus diwujudkan dalam bentuk:
 1. Saling pengertian.
 2. Saling menerima.
 3. Saling percaya.
 4. Saling menghargai untuk tidak saling klaim kebenaran.
 5. Saling kasih sayang untuk tidak saling membenci.

D. SARAN-SARAN MENGENAI LANGKAH-LANGKAH OPERASIONAL YANG PERLU DITEMPUH UNTUK MENCERAHKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA.

Untuk menyampaikan saran-saran sebagaimana maksud judul diatas, para pemikir dan pengembang pendidikan islam pada umumnya mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut pada gilirannya melahirkan beberapa model dalam pengembangan pendidikan agama islam. Muhaimin (2009) dalam hal ini menggambarkan model-model pengembangan PAI/ Perguruan Tinggi sebagaimana uraian tersebut:

1. MODEL DIKOTOMIS.

Pada model ini, aspek kehidupan dipandang dengan sangat sederhana, kata kuncinya adalah *dikotomi* atau *diskrit*. Segala sesuatu

hanya dilihat dari dua sisi yang berlawanan, seperti laki-laki dan perempuan, ada dan tidak ada, bulat dan tidak bulat, pendidikan agama dan pendidikan non agama, demikian seterusnya. Pandangan dikotomis tersebut pada gilirannya dikembangkan dalam memandang aspek kehidupan dunia dan akhirat, kehidupan jasmani dan rohani, sehingga pendidikan agama islam hanya diletakkan pada aspek kehidupan akhirat saja atau kehidupan rohani saja. Seksi yang mengurus masalah keagamaan disebut sebagai seksi kerohanian. Dengan demikian, pendidikan agama dihadapkan dengan pendidikan non agama, pendidikan keislaman dan pendidikan nonkeislaman, demikian seterusnya.

Pandangan semacam itu akan berimplikasi pada pengembangan pendidikan agama islam yang hanya berkisar pada aspek kehidupan ukhrowi yang terpisah dengan kehidupan duniawi, atau aspek kehidupan rohani yang terpisah dengan kehidupan jasmani. Pendidikan (agama) islam hanya mengurus persoalan ritual dan spiritual, sementara kehidupan ekonomi, politik, seni-budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan sebagainya dianggap sebagai urusan duniawi yang menjadi bidang garap pendidikan non agama. Pandangan dikotomis inilah yang menimbulkan dualisme dalam sistem pendidikan. Istilah pendidikan agama dan nonagama, atau ilmu agama dan ilmu umum sebenarnya muncul dari pandangan dikotomis tersebut.

Adanya perubahan dan penyempitan pengertian ulama menjadi fuqaha, sebagai orang-orang yang hanya mengerti soal-soal keagamaan belaka, sehingga tidak dimasukkan kedalam barisan kaum intelektual, juga merupakan implikasi dari pandangan dikotomis tersebut. Menurut Azra (1999) pemahaman semacam itu muncul ketika umat islam Indonesia mengalami masa penjajahan yang sangat panjang, dimana umat islam mengalami keterbelakangan dan disintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perbenturan umat islam dengan pendidikan dan kemajuan Barat memunculkan

kaum intelektual baru (cendekiawan sekuler), yang menurut Benda (dalam Sartono Kartodirjo, ed. 1981) sebagian besar kaum intelektual tersebut adalah hasil pendidikan Barat yang terlatih berpikir secara Barat. Dalam proses pendidikannya mereka mengalami *brain washing* (cuci otak) dari hal-hal yang berbau Islam, sehingga mereka menjadi teralineaasi (terasing) dari ajaran-ajaran Islam dan Muslim sendiri. Bahkan terjadi gap (kesenjangan) antara kaum intelektual baru (sekuler) dengan intelektual lama (ulama), dan ulama dikonotasikan sebagai kaum sarungan yang hanya mengerti soal-soal keagamaan dan buta dalam masalah-masalah keduniaan.

Pandangan dikotomis mempunyai implikasi terhadap pengembangan pendidikan yang lebih berorientasi pada keakhiratan, sedangkan masalah dunia dianggap tidak penting, serta menekankan pada pendalaman al-'ulum al-diniyah (ilmu-ilmu keagamaan) yang merupakan jalan pintas untuk menuju kebahagiaan akhirat, sementara sains (ilmu pengetahuan) dianggap terpisah dari agama. Demikian pula pendekatan yang dipergunakan lebih bersifat keagamaan yang normatif, doktriner dan absolutis. Peserta didik diarahkan untuk menjadi pelaku (actor) yang loyal (setia), memiliki sikap *commitment* (keberpihakan), dan dedikasi (pengabdian) yang tinggi terhadap agama yang dipelajari. Sementara itu, kajian-kajian keilmuan yang bersifat empiris, rasional, analitis kritis, dianggap dapat menggoyahkan iman, sehingga perlu ditindih oleh pendekatan keagamaan yang normative dan doktriner tersebut.

Model dikotomis tersebut pernah terwujud dalam realitas sejarah pendidikan Islam. Pada periode pertengahan, lembaga pendidikan Islam (terutama madrasah sebagai lembaga pendidikan atau al-jamiah) tidak pernah menjadi universitas yang difungsikan semata-mata untuk mengembangkan tradisi penyelidikan bebas berdasarkan nalar. Ia banyak diabdikan kepada al-'ulum al-diniyah (ilmu-ilmu agama) dengan penekanan pada fiqih, tafsir dan hadits. Sementara ilmu-ilmu nonagama (keduniaan), terutama ilmu-ilmu alam

dan eksakta sebagai akar pengembangan sains dan teknologi, sejak awal perkembangan madrasah dan al-jami'ah sudah berada dalam posisi marginal.

Islam tidak pernah membedakan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu umum (keduniaan), dan tidak berpandangan dikotomis mengenai ilmu pengetahuan. Namun demikian, dalam realitas sejarahnya justru supremasi lebih diberikan pada ilmu-ilmu agama (al-'ulum al-diniyah) sebagai jalan tol menuju Tuhan. Sebelum kehancuran teologi Mu'tazilah pada masa khalifah Al- Ma'mun (198-218 H/813-833 M), mempelajari ilmu-ilmu umum (kajian-kajian nalar dan empiris) ada dalam kurikulum madrasah, tetapi dengan pe-*makruh*-an atau bahkan lebih ironis lagi "pengharaman" penggunaan nalar setelah runtuhnya Mu'tazilah, ilmu-ilmu umum yang dicurigai itu dihapuskan dari kurikulum madrasah. Mereka yang berminat mempelajari ilmu-ilmu umum dan yang mempunyai semangat scientific inquiry (penyelidikan ilmiah) guna membuktikan kebenaran ayat-ayat kauniyah, terpaksa harus belajar sendiri-sendiri atau dibawah tanah, karena dipandang sebagai ilmu-ilmu subversive yang dapat menggugat kemapanan kemapanan doktrin sunni, terutama ilmu kalam dan fiqh. Adanya madrasah *at-Thib* (Sekolah Kedokteran) juga tidak dapat mengembangkan ilmu kedokteran dengan bebas, karena sering digugat fuqaha', misalnya tidak diperkenankan menggunakan organ-organ mayat sekalipun dibedah untuk diselidiki. Demikian pula Rumah Sakit Riset di Baghdad dan Kairo, karena dibayangi legalisme fiqh yang kaku akhirnya harus berkonsentrasi pada ilmu kedokteran teoritis dan perawatan.

Mengapa legalisme fiqh atau syari'ah dan ortodoksi agama serta semangat intoleransi terhadap para saintis begitu dominan dalam lembaga pendidikan islam? Menurut Azra (dalam Stanton, 1994), karena *pertama*, pandangan tentang ketinggian syari'ah atau ilmu-ilmu keagamaan, sebagai jalan tol untuk menuju Tuhan; *kedua*, lembaga-lembaga pendidikan islam secara institusional dikuasai oleh mereka

yang ahli dalam bidang ilmu-ilmu keagamaan, sehingga kelompok saintis (Dar al-'ilm) tidak mendapat dukungan secara institusional, justru fuqaha' berhadapan dengan tantangan saintis, sehingga kaum saintis tidak berdaya menghadapi fuqaha' yang mengklaim legitimasi religius sebagai *the guardian of God's given law* (pelindung/penguasa syari'ah); dan *ketiga*, hampir seluruh madrasah/al jami-'ah didirikan dan dipertahankan dengan dana wakaf dari para dermawan dan penguasa politik muslim. Motivasi kesalehan mendorong para dermawan untuk mengarahkan madrasah pada lapangan ilmu-ilmu agama yang lebih banyak mendatangkan pahala.

Bertolak dari kenyataan sejarah tersebut, maka kemunduran peradaban islam serta keterbelakangan sains dan teknologi di dunia islam di samping karena factor dari luar juga banyak dipengaruhi oleh factor dari dalam diri umat islam sendiri, yang kurang peduli terhadap kebebasan penalaran intelektual dan kurang menghargai kajian rasional-empirik atau semangat pengembangan ilmiah dan filosofis. Dengan kata lain, model dikotomis dijadikan sebagai titik tolak dalam pengembangan pendidikan.

2. MODEL MEKANISME

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1996), *mechanism* secara etimologis berarti: hal kerja mesin, cara kerja suatu organisasi, atau hal saling bekerja seperti mesin, kalau yang satu bergerak, maka yang lain turut bergerak.

Model *mechanism* memandang kehidupan terdiri atas berbagai aspek, dan pendidikan dipandang sebagai penanaman dan pengembangan seperangkat nilai kehidupan, yang masing-masing bergerak dan berjalan menurut fungsinya, bagaikan sebuah mesin yang terdiri atas beberapa komponen atau elemen, yang masing-masing menjalankan fungsinya sendiri-sendiri, dan antara satu dengan lainnya bisa saling berkonsultasi atau tidak.

Aspek-aspek atau nilai-nilai kehidupan itu sendiri terdiri atas : nilai agama, nilai individu, nilai social, nilai politik, nilai ekonomi, nilai rasional, nilai estetika, nilai biofisik dan lain-lain. Dengan demikian, aspek atau nilai agama merupakan salah satu aspek atau nilai kehidupan dari aspek-aspek atau nilai-nilai kehidupan lainnya. Hubungan antara nilai agama dan nilai-nilai lainnya dapat bersifat *horizontal-lateral (independent)* atau *lateral-sekuensial*, atau *vertical-linier*. Relasi yang bersifat *horizontal-lateral (independent)*, mengandung arti bahwa beberapa mata pelajaran (mata kuliah) yang ada dan pendidikan agama mempunyai hubungan yang sederajat dan independent, dan tidak saling berkonsultasi. Relasi yang bersifat *lateral-sekuensial*, berarti diantara masing-masing mata pelajaran (mata kuliah) tersebut mempunyai relasi sederajat yang bisa saling berkonsultasi. Sedangkan relasi *vertical linier* berarti kedudukan pendidikan agama sebagai sumber nilai atau sumber konsultasi, sementara seperangkat mata pelajaran (mata kuliah) yang lain adalah termasuk pengembangan nilai-nilai insani yang mempunyai relasi *vertical-linier* dengan agama.

Umat islam dididik dengan seperangkat ilmu pengetahuan atau mata pelajaran, salah satunya adalah mata pelajaran pendidikan agama yang mempunyai fungsi sendiri, yaitu; *pertama*, pengembangan dan peningkatan keimanan dan ketaqwaan; *kedua*, penyaluran bakat dan minat dalam mendalami agama; *ketiga*, perbaikan kesalahan, kekurangan dan kesalahan dalam keyakinan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama; *keempat*, pencegahan hal-hal negative dari lingkungannya atau budaya asing yang berbahaya; *kelima*, sumber nilai atau pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat; dan *keenam*, pengajaran atau penyampaian pengetahuan keagamaan (Muhaimin, dkk.,1996). Jadi, pendidikan agama lebih menonjolkan fungsi moral dan spiritual atau dimensi afektif daripada kognitif dan psikomotor, dalam arti dimensi kognitif psikomotor diarahkan untuk pembinaan afektif (moral dan spiritual), yang berbeda dengan mata pelajaran lainnya.

Model tersebut tampak dikembangkan pada sekolah atau Perguruan Tinggi (PT) yang bukan berciri khas agama islam. Didalamnya diberikan seperangkat mata pelajaran atau ilmu pengetahuan (mata kuliah), salah satunya adalah mata pelajaran atau mata kuliah pendidikan agama yang hanya diberikan dua jam pelajaran per minggu atau diperguruan tinggi tiga sks, dan didudukkan sebagai mata kuliah dasar umum, yakni sebagai upaya pembentukan kepribadian yang religius.

3. MODEL ORGANISASI/SISTEMIK.

Dalam konteks pendidikan islam, model organism bertolak dari pandangan bahwa aktivitas kependidikan merupakan suatu system yang terdiri atas komponen-komponen yang hidup bersama dan bekerjasama secara terpadu menuju tujuan tertentu, yaitu terwujudnya hidup yang religius atau yang dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai agama.

Pandangan semacam itu menggarisbawahi pentingnya kerangka pemikiran yang dibangun dari *fundamental doctrines* dan *fundamental values* yang tertuang dan terkandung dalam Al-Qur'an dan *al- sunah ash-shahihah* sebagai sumber pokok. Ajaran dan nilai-nilai Ilahi/agama/wahyu didudukkan sebagai sumber konsultasi yang bijak, sementara aspek-aspek kehidupan lainnya didudukkan sebagai nilai-nilai insani yang mempunyai hubungan vertical-linier dengan nilai Ilahi/agama.

Melalui upaya semacam itu, maka system pendidikan islam diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai ilmu pengetahuan, nilai-nilai agama dan etik, serta mampu melahirkan manusia-manusia yang menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, memiliki kematangan professional, dan sekaligus hidup di dalam nilai-nilai agama.

Paradigma tersebut tampaknya mulai dapat dirintis dan dikembangkan dalam system pendidikan di madrasah, yang dideklarasikan sebagai sekolah umum yang berciri khas agama Islam, atau sekolah-sekolah (swasta) Islam unggulan. Kebijakan pengembangan madrasah berusaha mengakomodasikan tiga kepentingan utama, yaitu: *pertama*, sebagai wahana untuk membina roh atau praktik hidup keislaman; *kedua*, memperjelas dan memperkuat keberadaan madrasah sederajat dengan system sekolah, sebagai wadah pembinaan warga Negara yang cerdas, berpengetahuan, berkepribadian, serta produktif; dan *ketiga*, mampu merespons tuntutan-tuntutan masa depan, dalam arti sanggup melahirkan manusia yang memiliki kesiapan memasuki era globalisasi, industrialisasi, maupun era informasi (Fadjar, 1998).

Bagaimana dengan PAI di Perguruan Tinggi Umum ? Menurut Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor: 38/DIKTI/Kep/2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, bahwa Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu mata kuliah kelompok pengembangan kepribadian (MPK). Visi mata kuliah ini menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan peserta didik mengembangkan kepribadiannya. Sedangkan misinya adalah membantu peserta didik agar mampu mewujudkan nilai dasar agama dalam menerapkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang dikuasainya dengan rasa tanggung jawab kemanusiaan (Pasal 1 dan 2).

SK Dirjen tersebut diperbarui dengan ditetapkannya Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor; 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di Perguruan Tinggi. Didalamnya dinyatakan bahwa:

- ❑ Visi kelompok MPK di perguruan tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program

studi guna mengantarkan peserta didik memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

- ❑ Misi kelompok MPK di perguruan tinggi membantu peserta didik memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab.

Dari uraian-uraian diatas maka saran-saran mengenai langkah-langkah operasional yang perlu ditempuh adalah:

1. Sistem pendidikan islam diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai ilmu pengetahuan, nilai-nilai agama dan etik. Serta mampu melahirkan manusia-manusia yang menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknik dan seni, memiliki kematangan professional dan sekaligus hidup di dalam nilai-nilai agama.
2. Melaksanakan keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 38/DIKTI/Kep/2002 bahwa mata kuliah PAI merupakan salah satu kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi.

Problem-problem serius yang dihadapi oleh PTAI harus segera diatasi, pihak yang paling bertanggung jawab adalah para pimpinan lembaga pendidikan atau Perguruan Tinggi agama islam tersebut karena mereka merupakan pengendali, meskipun problem-problem itu bisa saja terjadi karena ulah orang lain. Kemudian seluruh civitas akademika, harus merespons dengan kompak kepada pimpinan dalam mengadakan pembenahan.

Lembaga pendidikan Islam harus segera melakukan pembenahan dalam berbagai aspek, baik yang berhubungan dengan perangkat keras maupun perangkat lunak dalam menghadapi pencerahan Pendidikan Islam masa depan (Malik Fajar,1998). Malik Fajar juga menguraikan bahwa untuk penguatan akademik ada beberapa pikiran praktis yang perlu diperhatikan berikut ini :

- a. Pemeliharaan dan peningkatan stabilitas kelembagaan. Dengan demikian, citra sebagai lembaga keilmuan melalui berbagai model dialog, komunikasi timbal balik, keterbukaan, dan kebebasan yang bertanggung jawab tetap terjaga.
- b. Pemeliharaan serta peningkatan system akademik dan kemahasiswaan. Dengan demikian, perguruan tinggi Islam dapat menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menjunjung pelaksanaan manajemen belajar mengajar yang mantap, dengan melalui pembenahan serta pemenuhan berbagai sarana dan prasarana.
- c. Menciptakan suatu model belajar privat (tambahan), yaitu “student day” (misalnya setiap sabtu) sebagai model pengembangan daya kreasi dan apresiasi kehidupan kampus.
- d. Pembentukan lembaga studi/kajian, seperti pusat studi Islam, pusat penelitian, dan pusat pembibitan.
- e. Pemberian keleluasaan pada tiap-tiap fakultas/jurusan untuk mengembangkan dan meningkatkan kegiatan kuliah tamu dan latihan-latihan keahlian dalam berbagai bidang, seperti bahasa, perpajakan, perbankan, dan sebagainya.

III. PENUTUP/KESIMPULAN.

Berbagai krisis multidimensional yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia memang tidak bisa hanya dilihat dan diatasi melalui pendekatan *mono dimensional*. Namun demikian, karena segala krisis tersebut berpangkal dari krisis akhlaq atau moral, maka pendidikan agama dipandang memiliki peranan yang sangat vital dalam membangun watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Untuk itu, diperlukan pengembangan pendidikan agama yang lebih kondusif dan prospektif terutama disekolah atau perguruan tinggi. Model pengembangannya perlu direkonstruksi, dari model yang bersifat dikotomik dan mekanisme kearah model organisme atau sistemik. Hanya saja untuk merombak model tersebut diperlukan kemampuan dan *political will* dari para pengambil kebijakan, termasuk didalamnya para pimpinan lembaga pendidikan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhaimin, 2009, “Rekonstruksi Pendidikan Islam”. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mujamil Qomar, (2007),”Manajemen Pendidikan Islam”, Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam. Jakarta: Erlangga.
- A. Malik Fajar, (1998), “Visi Pembaharuan Pendidikan Islam”. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penyusunan Naskah Indonesia.
- A. Malik Fajar, (2005), “Holistik Pemikiran Pendidikan”. Jakarta: Grafindo Persada.
- Qodry Azizy, (2004), “Pengembangan UIN dan Integrasi Ilmu Agama”. Dalam M. Zainuddin dan Muhammad In’am Esha “Horison Baru Pengembangan Pendidikan Islam”, Upaya merespons dinamika masyarakat global. Yogyakarta, Aditya Media.
- Azyumardi Azra, (1999), “Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru”. Jakarta: Logas Wacana Ilmu.
- Abudin Nata, (2003), ” Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia” Jakarta : Prenada Media.

